

# Pengawasan Responsif Gender

*Public Financial Management Multi-Donor Trust Fund II*

Live Webinar:  
**Arah Kebijakan dan  
Strategi Pengawasan Pengarusutamaan Gender di Indonesia**  
Jakarta, Selasa 15 November 2022



Dikdik Sadikin, Ak., MSi., CA, CFA, CIA, CGCAE  
Direktur Pengawasan  
Bidang Pengembangan SDM dan Kebudayaan BPKP



Canada



## BIODATA

<b>NAMA</b>	: <b>Dikdik Sadikin, Ak., M.Si.,CA, CFA, QIA, CGCAE</b>
eMail, kontak	: <a href="mailto:dikdik65.ds@gmail.com">dikdik65.ds@gmail.com</a> , HP 081242575006
Tempat/Tgl. Lahir	: Jakarta, 20 Februari 1965
NIP	: 19650220 198603 1 001
Jabatan	: Direktur Pengawasan Pengembangan SDM dan Kebudayaan BPKP
Pangkat/Golongan	: Pembina Utama Madya / IVd
Instansi	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jalan Pramuka Nomor 33, lantai 5, Jakarta Timur 13120
Riwayat Pendidikan	: - D.IV Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Lulus 1994 - S.2, Magister Administrasi Publik (MAP) UGM Yogyakarta, Lulus 2006
Riwayat Jabatan	: - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, 2014 - Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 1 BPKP, 2016 - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, 2017 - Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah BPKP, 2019 - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, 2020 - Direktur Pengawasan Pengembangan SDM dan Kebudayaan BPKP, Februari 2022 s.d. Sekarang



Canada

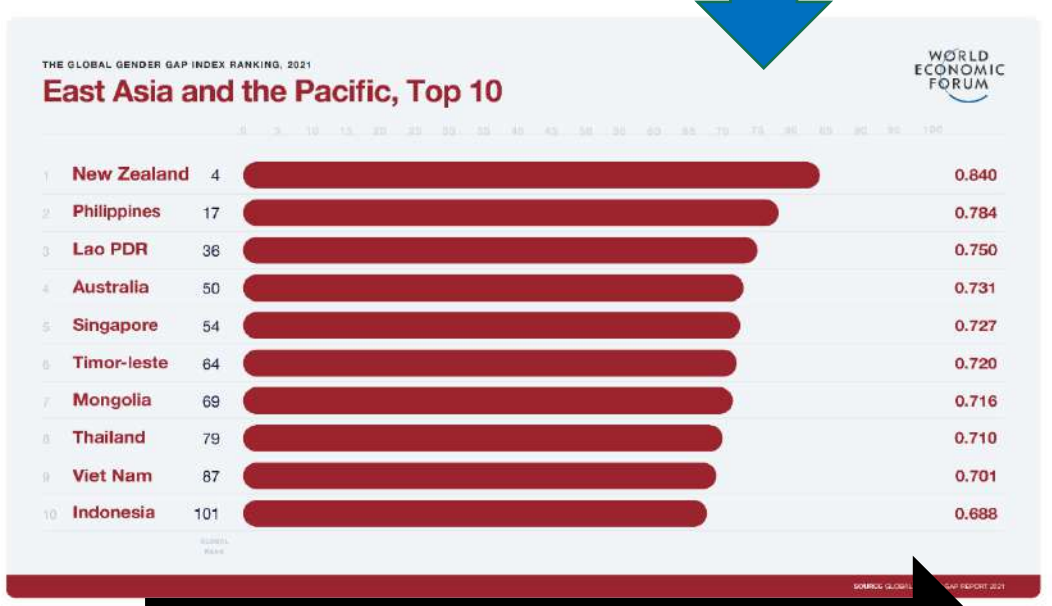


# SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

## Latar Belakang: Kondisi Eksisting Indonesia



Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Politik



Kebutuhan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Sumber: weforum.org



# PENGARUS UTAMAAN GENDER

## KONDISI PERATURAN

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan



Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019



Percepatan implementasi

Strategi Nasional (STRANAS) tentang Percepatan Pelaksanaan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)



melalui

Surat Edaran Bersama:  
Menteri Bappenas/PPN No.270/M.PPN/11/2012,  
Menteri Keuangan No. SE-33/MK.02/2012,  
Menteri Dalam Negeri No. 050/4379A/2012 dan  
Menteri PP&PA No. SE 46/MPP-PA/11/2012a

- Stranas habis masa berlakunya
- Rancangan Perpres?
- PPRG belum terintegrasi dengan pengawasan.



Permenpppa 042014

Sbg Panduan Pengawasan PPRG K/L, 2017



# Tema, Prioritas Pengarusutamaan dan Kaidah RPJMN 2020-2024

## Tema RPJMN IV 2020-2024

“Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”

## 7 Prioritas Nasional RPJMN IV 2020-2024

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur, mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

## Pengarusutamaan RPJMN IV 2020-2024

1. Gender
2. Tujuan pembangunan berkelanjutan
3. Modal sosial dan budaya
4. Transformasi digital

## Kaidah Pembangunan RPJMN IV 2020-2024

1. Pembangunan kemandirian
2. Menjamin keadilan
3. Menjaga keberlanjutan

Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial menjadi **prinsip** sekaligus sebagai **katalis pembangunan** untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkeadilan



Canada



# Pengertian Kesetaraan Gender

Kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

*(RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak)*

# Pengertian Kesetaraan Gender

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

*(Rancangan Perpres tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender )*



Canada



# Rancangan *Perpres tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender*

Stranas Percepatan PUG **bertujuan** untuk mempercepat tercapainya Kesetaraan Gender melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG.

Dilaksanakan melalui **dua area perubahan**, meliputi: a. penguatan kelembagaan PUG yang efektif dan berkelanjutan; dan b. penguatan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan

Dua area perubahan tersebut dilaksanakan melalui **5 (lima) strategi**, meliputi:

- a. penyusunan peta jalan pembangunan Kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. pengintegrasian Gender dalam kebijakan strategis dan kebijakan sektoral;
- c. pengembangan instrumen PUG dalam proses pembangunan;
- d. penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- e. penguatan lingkungan strategis.





“Saya ingin tegaskan bahwa peran utama **pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan**, menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin tercapainya tujuan **belanja anggaran secara akuntabel, efektif, dan efisien.**

Kualitas perencanaan yang perlu terus ditingkatkan. Saya melihat masih ada program yang **tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak jelas sasarannya, anggaran itu yang mau disasar apa**, sehingga ini **tidak mendukung pencapaian dari tujuan**, dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya.”

-Rakorwasnas, 2021-



Canada



# 01 Fokus Pengawasan BPKP: Mengawal Tercapainya Tujuan Pembangunan

02 **Perencanaan merupakan kunci keberhasilan pencapaian tujuan**

## Permasalahan



- Kegiatan selesai terlaksana
- Tingkat penyerapan anggaran tinggi



**Hasil yang dirasakan masyarakat kurang optimal**

## RESULT ORIENTED GOVERNMENT

PEMERINTAHAN BERORIENTASI HASIL

"membiayai hasil, bukan masukan (INPUT)"

BERAPA  
BESAR  
DANA  
YANG  
TELAH DAN  
AKAN  
DIHABISKAN

INPUT ORIENTED



PERUBAHAN  
PARADIGMA

## OUTCOME

berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan

03 **BPKP mengawal akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas pembangunan**



**Keuangan**

Kepatuhan terhadap pertanggungjawaban keuangan negara



**Kinerja**

(Efektif, Efisien, dan Ekonomis)

Akuntabilitas Kinerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan akuntabilitas keuangan

PP Nomor 8/2006



# Permasalahan dalam Perencanaan APBN/D



**KINERJA TIDAK TERCAPAI DAN PEMBOROSAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH**

# Instrumen PUG dalam pengawasan

Meliputi (namun tidak terbatas pada):

a.instrumen PUG dalam audit;

b.instrumen PUG dalam reviu;

c.instrumen PUG dalam pemantauan;

d.instrumen PUG dalam evaluasi.

*(Rancangan Perpres tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender )*



Canada



# Jenis Pengawasan yang Dapat Dilaksanakan

“evaluasi” adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Kriteria Pengawasan:

## Perencanaan

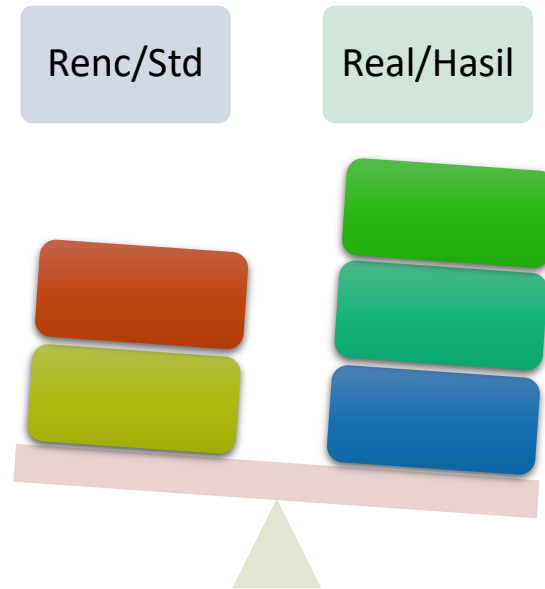
- RPJMN
- RKP
- Renja

## Pengarusutamaan Gender

- Inpres No. 9 Tahun 2000
- Permen PPA No. 4 Tahun 2014
- Stranas Percepatan PUG

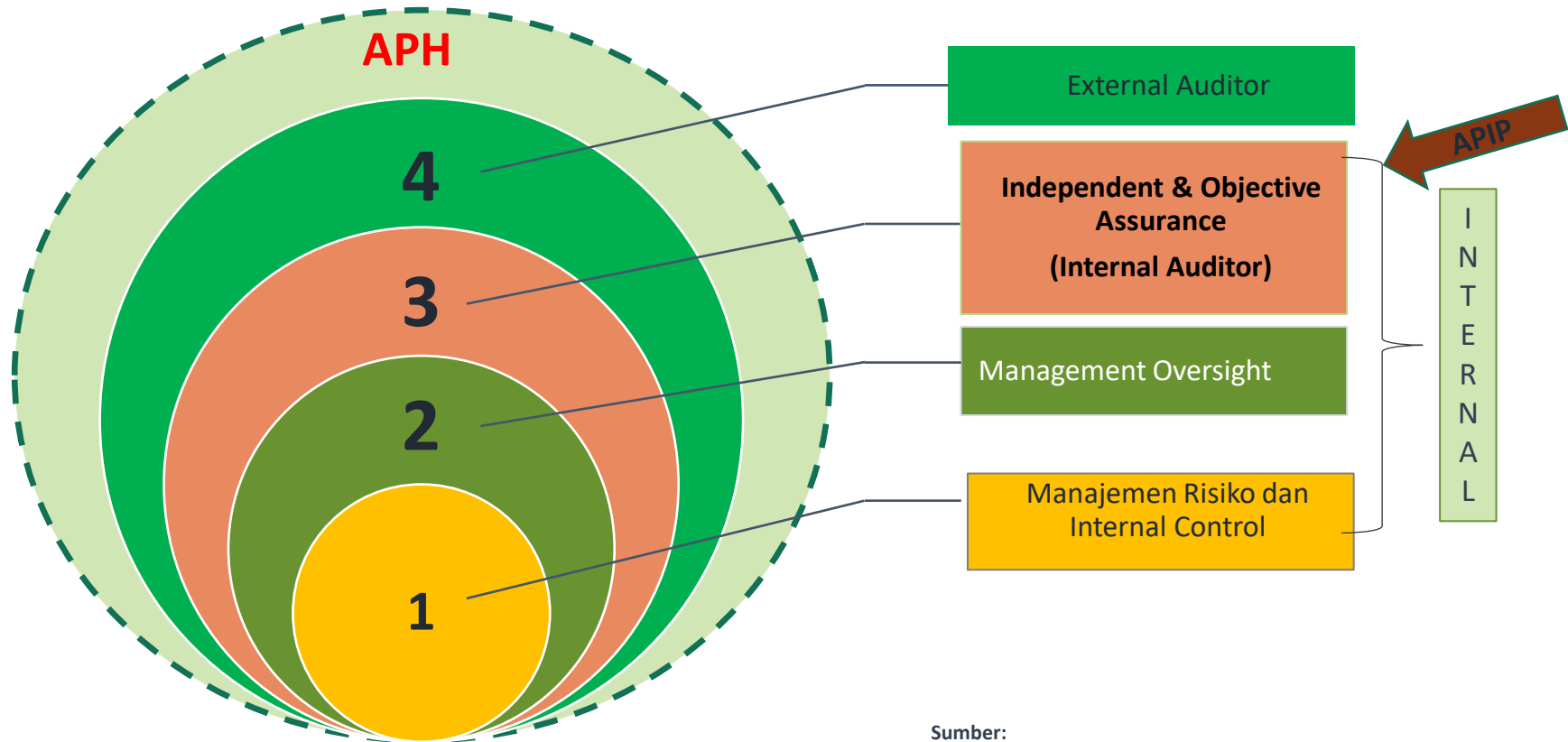
## Stunting

- Perpres No.72 Tahun 2021
- Perban BKKBN No.12 Tahun 2012



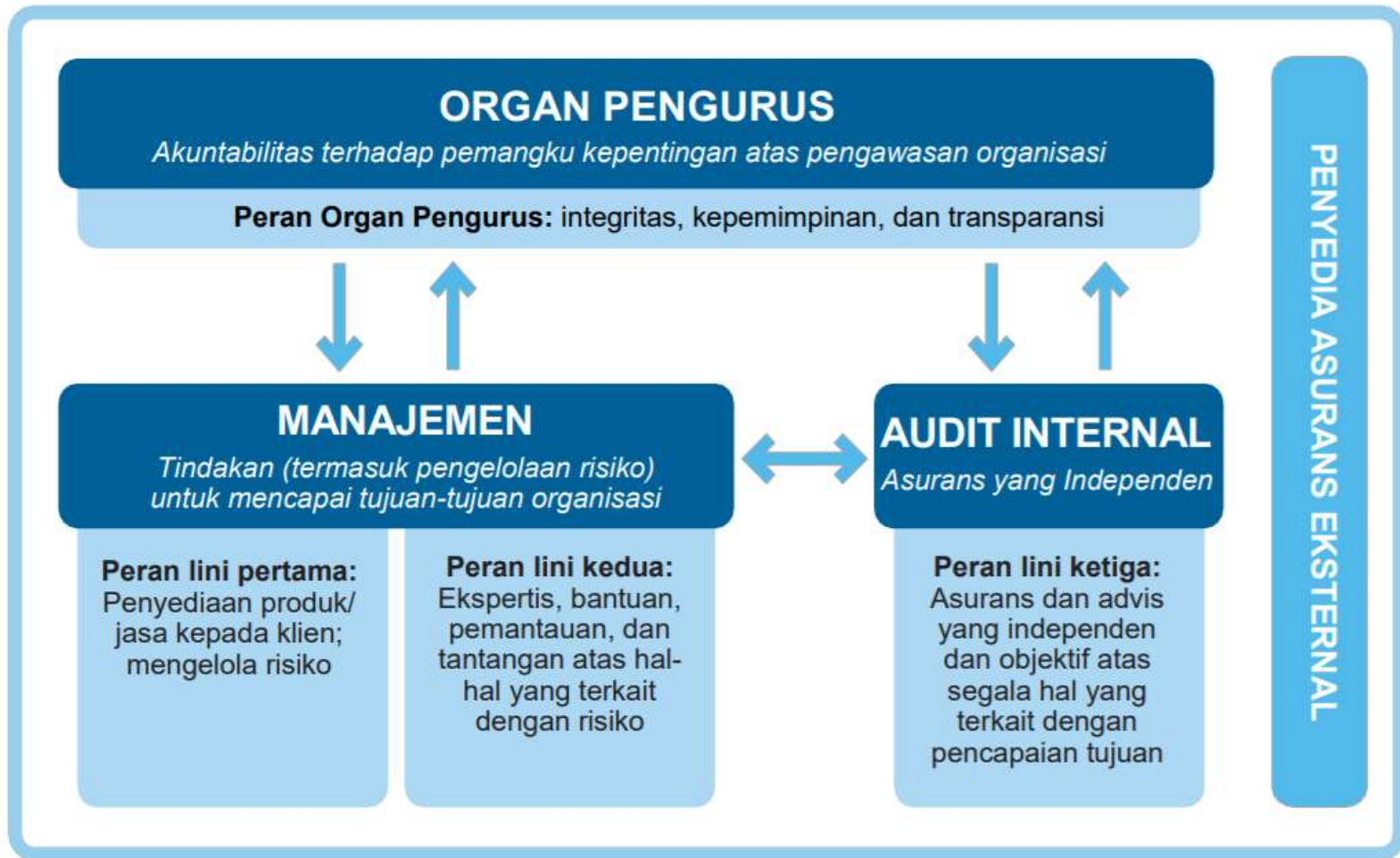
“reviu” adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan

# Four Lines of Defence



Sumber:  
Association of Chartered Certified Accountants, UK,  
(dimodifikasi)

# Model Tiga Lini IIA



## KUNCI:



Akuntabilitas, Pelaporan



Delegasi, mengarahkan, Menyediakan sumber daya, dan Pengawasan



Keselaran, Komunikasi, Koordinasi, dan Kolaborasi



Canada



# FRAMEWORK MANAGERIAL



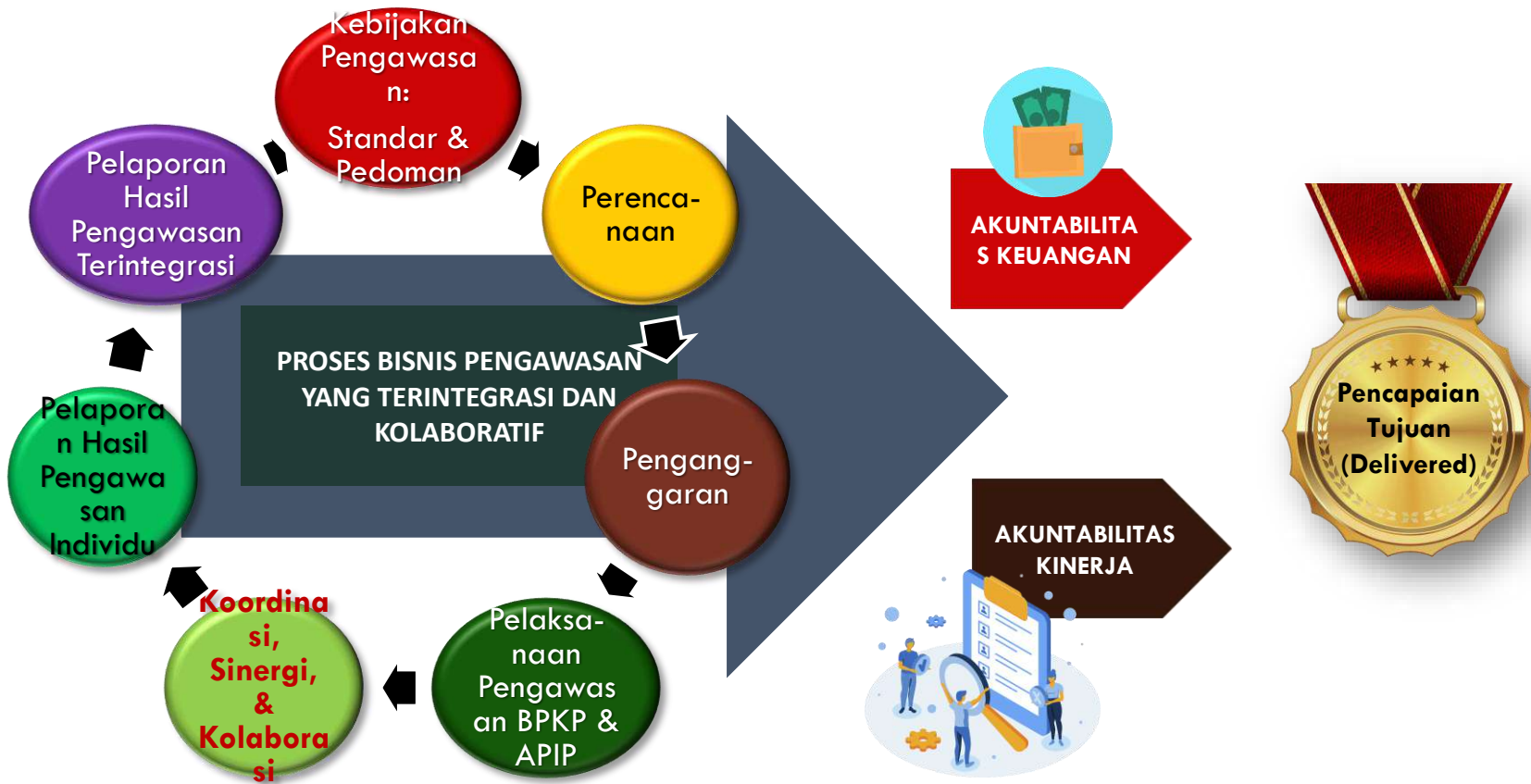
Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah (Inpres 9 Tahun 2000)

“PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari **perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi** atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.”

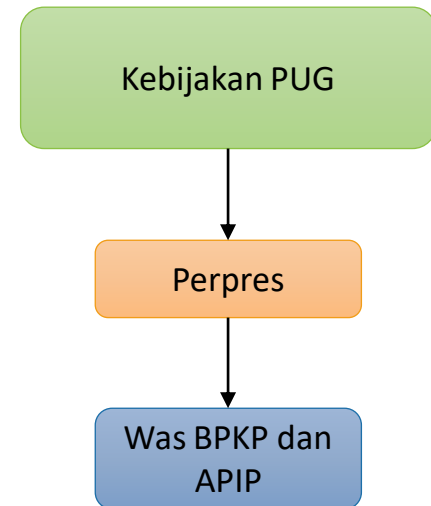
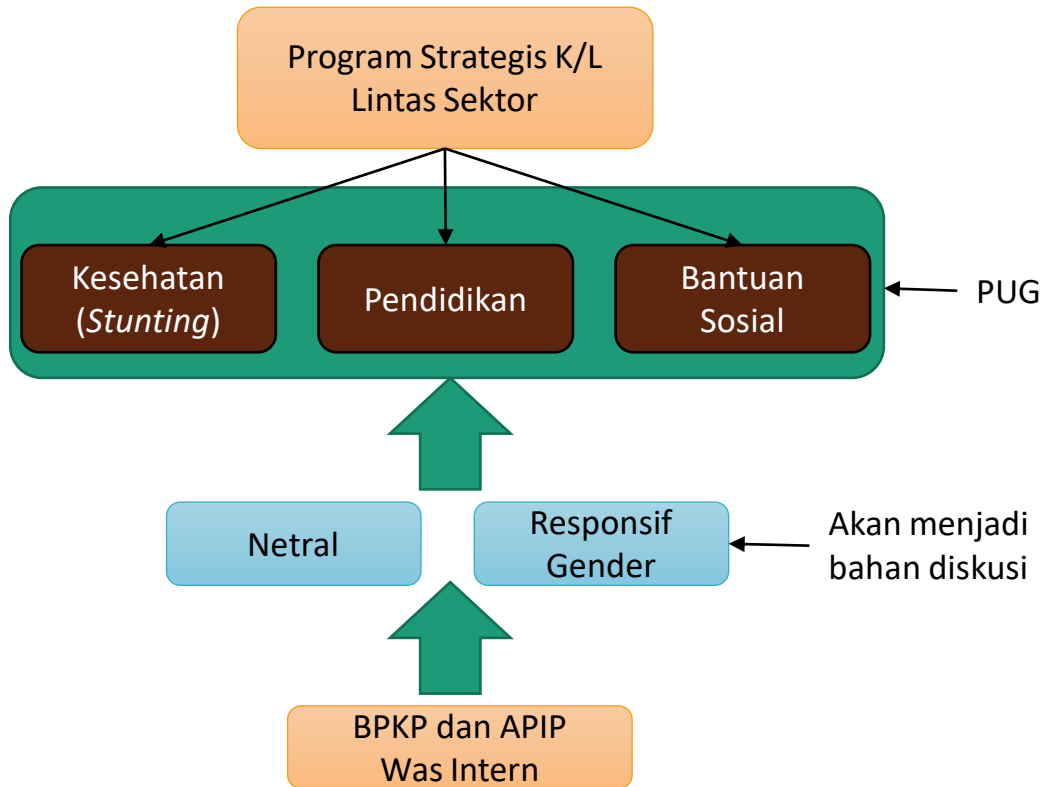
Sumber: Permendagri No.15 Tahun 2008 diubah dengan Pemendagri No.67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah



# FRAMEWORK PENGAWASAN INTERN



# PENGAWASAN INTERN



Saat ini Pengarusutamaan Gender baru dilaksanakan pada Tahap Perencanaan dan Penganggaran



Canada



**BPKP**



**PEDOMAN  
PENGAWASAN PUG**



**APIP  
KLD**

PENILAIAN LEVEL  
KAPABILITAS APIP, DIKLAT  
SERTIFIKASI/TEKNIS DSB

Reviu, Evaluasi,  
Monitoring,  
Audit, dll



**Prasyarat PUG**

**KOMITMEN**

**KEBIJAKAN**

**KELEMBAGAAN**

**SUMBER DAYA**

- Sumber Daya Manusia
- Sumber Dana

**DATA TERPILAH**

**ALAT ANALISIS**

**PARTISIPASI  
MASYARAKAT**



**Siklus Tata Kelola  
PUG**

Perencanaan

Evaluasi

Penyusunan  
Anggaran

Pemantauan

Pelaksanaan

PENILAIAN  
SPIP  
TERINTEGRASI

**MANFAAT  
BAGI MASYARAKAT**

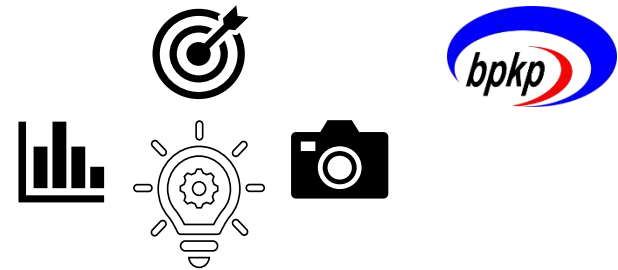


Canada





# Thank you



Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan SDM dan Kebudayaan



Canada



## CONTOH IMPLEMENTASI RESPONSIF GENDER DI K/L (VIDEO) KPPN DAN KEMEN PUPR

KPPN:

[https://www.youtube.com/watch?v=3-7X\\_8gN6rc](https://www.youtube.com/watch?v=3-7X_8gN6rc)

KEMEN PUPR :

<https://youtu.be/6BkwS7Uu3vE>



Canada

